

CASCADING KECAMATAN

VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal

Indikator Tujuan : IKM Kecamatan

SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Indikator Sasaran : IKM pelayanan Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target

Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

IP ASN Perangkat Daerah

Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan

Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan/Bahan/ Material

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun

Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah laporan keuangan bulanan

Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy

Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll

Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, pengantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan

Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

XXX (yang tercantum dalam Perbup PATEN sdt tidak ada lagi bidang perizinan yang didelegasikan ke Kecamatan)

Jumlah Pelayanan/Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan

Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan